

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH,
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta - 55187
Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415
Email: pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id
Website: www.pt-yogyakarta.go.id

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 ini dapat kami sajikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan Laporan yang menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama tahun 2020, berdasarkan capaian kinerja yang telah dilakukan atas perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta diuraikan mengenai pencapaian (IKU) (Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Analisis Akuntabilitas Kinerja selama tahun 2020.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2020, mempunyai 3 (Tiga) Program yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Mahkamah Agung, serta Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berusaha secara maksimal agar ketiga program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020 telah disusun, namun masih belum sempurna. Oleh karena itu masih diharapkan masukan yang positif dan konstruktif guna kesempurnaan penyusunan laporan ini.

Semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat memacu Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 15 Februari 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



RIPTO, S.H., M.H.

NIR. 19541009 198103 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta	4
C. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2020	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Yogyakarta	16
B. Realisasi Anggaran Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	42
BAB IV PENUTUP	45
BAB V LAMPIRAN	46
1. Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Yogyakarta	
2. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2020	
3. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
6. Matriks Rencana Strategis Review	
7. SK Penetapan Riviui IKU	
8. SK Tim penyusun RENSTRA 2020-2024	
9. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2020	
10. SK Tim Evaluasi dan Monev LKjIP Tahun 2020	
11. Penghargaan yang diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta	



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020- 2024, yaitu di bidang hukum dan aparatur. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Menengah (RPJM) 2020- 2024, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja dan berkesinambungan. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun

Program kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Strategis yang mengacu pada Pembangunan Jangka Tahunan secara konsisten

2020 adalah sebagai berikut :

Tabel.1 Sasaran Strategis

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor.	86% 86% 86%	84,71% 87,09% 77,77%	98,5% 101,26% 90,43%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi	36%	32,12%	89,22%
		d. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	85%	97,65%	114,88%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%	100%	100%

Hasil capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan, diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.



BAB I PENDAHULUAN



BAB I- PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga menggunakan dana APBN. Baik, tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI



Gambar.1
Gedung Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 51 menyatakan bahwa Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Banding yang diatur dalam undang-undang, dan diperjelas lagi yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, bahwa tugas Pokok Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai *Judicial Power*, yaitu :

- a. Bahwa pada pasal 51 ayat 1 menyatakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan.

- b. Pengadilan Agama dalam tingkat banding, selanjutnya;
- c. Bahwa pada pasal 51 ayat 2 menyatakan Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

3. Fungsi

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya, menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

C. ORGANISASI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan PERMA 7 Tahun 2015.



Gambar.2
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 antara lain :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata, pidana biasa, pidana anak dan tipikor di tingkat banding.
2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta.
4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2019, sebagai berikut :

BAB I - Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta; dan Struktur Organisasi.

BAB II - Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi

Yogyakarta; Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta; dan Penetapan Kinerja.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, menguraikan mengenai Realisasi Indikator Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020; dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

BAB IV - Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**A. Rencana Strategis 2020 - 2024**

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 - 2024, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah "*Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung*".

Penjelasan :

- a. Pengadilan Tinggi Yogyakarta menunjukkan lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Umum di Yogyakarta dalam melakukan aktifitasnya.

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Peradilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- b. Meningkatkan sistem pelayanan yang meliputi jenis dan bentuk yang dibutuhkan dan kepuasan pengguna terpenuhi;
- c. Mengembangkan sistem *self assesment* secara periodik dan berjenjang;

Sasaran Strategis

Ada 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024, adapun sasaran strategis tersebut telah direview setelah di analisis target serta sasaran strategisnya (matriks renstra terlampir).

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program dan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dituangkan dalam sepuluh sasaran strategis yang merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi

Yogyakarta mempunyai Program Utama Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam melaksanakan Rencana (Renstra) 2020 - 2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai berikut :

Tabel. 2 Rencana Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100% 100% 100%
		B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	86% 86% 86%
		C. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi	36%

		D. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	85%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	A. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana	100% 100%
		B. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 - 2024. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100% 100% 100%

		<p>B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata 86% - Pidana 86% - Pidana Khusus Tipikor 86% 	
		<p>C. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasasi 36% 	
		<p>D. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding 85%</p>	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>A. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata 100% - Pidana 100% 	
		<p>B. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus 100%</p>	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel.4 Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
		B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	86% 86% 86%	84,71% 87,09% 77,77%	98,5% 101,26% 90,43%
		C. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi	36%	32,12%	89,22%
		D. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	85%	97,65%	114,88%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	A. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%

		B. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan capaian kinerja melebihi dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian dari sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan belum tercapai realisasinya.

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator, yaitu persentase sisa perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi yogyakarta.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel.5 Target Indikator Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA					
	URAIAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2018
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100%	100%	100%		
	- Perdata	100%	100%	100%		
	- Pidana					
	- Pidana Khusus Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	86%	84,71%	98,5%			
- Perdata	86%	87,09%	101,26%	99,79%	98,73%	
- Pidana						
- Pidana Khusus Tipikor	86%	77,77%	90,43%			
C. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :						
- Kasasi	36%	32,12%	89,22%	100%	100%	
D. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding		85%	97,65%	114,88%	114,6	105,4%

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut :

a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Tabel.6.1
Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara yang diselesaikan

Tahun	Tri Wulan	Sisa Yang Harus Diselesaikan	Sisa Yang Diselesaikan	Realisasi
2020	I	46	46	100%
	II	46	46	100%
	III	46	46	100%
	IV	46	46	100%
2019	I	42	42	100%
	II	42	42	100%
	III	42	42	100%
	IV	42	42	100%

Keterangan : Sisa perkara Tahun lalu yang harus diselesaikan sudah diselesaikan pada tri wulan ke I.

Tabel.6.2
Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara *Perdata* yang diselesaikan

Tahun	Tri Wulan	Sisa Yang Harus Diselesaikan	Sisa Yang Diselesaikan	Realisasi
2020	I	27	27	100%
	II	27	27	100%
	III	27	27	100%
	IV	27	27	100%
2019	I	31	31	100%
	II	31	31	100%
	III	31	31	100%
	IV	31	31	100%

Keterangan : Sisa perkara Tahun lalu yang harus diselesaikan sudah diselesaikan pada tri wulan ke I.

Tabel.6.3
Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara *Pidana* yang diselesaikan

Tahun	Tri Wulan	Sisa Yang Harus Diselesaikan	Sisa Yang Diselesaikan	Realisasi
2020	I	19	19	100%
	II	19	19	100%
	III	19	19	100%
	IV	19	19	100%
2019	I	11	11	100%
	II	11	11	100%
	III	11	11	100%
	IV	11	11	100%

Keterangan : Sisa perkara Tahun lalu yang harus diselesaikan sudah diselesaikan pada tri wulan ke I.

Tabel.6.4
Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara *Tipikor* yang diselesaikan

Tahun	Tri Wulan	Sisa Yang Harus Diselesaikan	Sisa Yang Diselesaikan	Realisasi
2020	I	-	-	-
	II	-	-	-
	III	-	-	-
	IV	-	-	-
2019	I	-	-	-
	II	-	-	-
	III	-	-	-
	IV	-	-	-

Keterangan : Tidak ada sisa Perkara Tipikor yang masuk pada pengadilan Tinggi Yogyakarta.

- ❖ Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100% dari jumlah sisa perkara tahun lalu sebanyak 46 perkara dapat diselesaikan 46 perkara. Sehingga persentase capaian untuk indikator ini adalah 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2018, tahun 2019 dan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2020-2024. Tercapainya target persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya ini karena penyelesaian perkara sesuai dengan SOP dan dengan adanya dukungan kinerja yang bagus dari semua unsur Sumber Daya Manusia yang terkait di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dan dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun sebagai berikut :

Tabel 7.1
Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	46	46	100%	100%	100%
2019	42	42	100%	100%	100%
2018	27	27	100%	100%	100%

Grafik 1. Persentase Sisa Perkara Pidana, Perdata, Tipikor yang diselesaikan



Tabel 7.2
Perbandingan Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	27	27	100%	100%	100%
2019	31	31	100%	100%	100%

*Tabel 7.3
Perbandingan Sisa Perkara **Pidana** yang diselesaikan*

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	19	19	100%	100%	100%
2019	11	11	100%	100%	100%

*Tabel 7.4
Perbandingan Sisa Perkara **Tipikor** yang diselesaikan*

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	-	-	100%	-	100%
2019	-	-	100%	-	100%

❖ **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 86%, jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan sebanyak 221 perkara dari jumlah perkara yang ada sebanyak 213 perkara. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 86% dan memperoleh capaian sebanyak 100% . Hal ini menunjukkan bahwa dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 realisasi capaian sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2020-2024. Tercapainya target persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 karena penyelesaian perkara sesuai dengan SOP dan adanya pengawasan rutin yang dilakukan oleh panitera muda, di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 dikarenakan banyaknya perkara yang masuk di akhir tahun pada tahun 2020 sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan yaitu tahun 2021.

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara yang

diselesaikan tepat waktu tahun 2020 Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut :

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 8.1
Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Tri Wulan	Sisa Tahun Lalu	Perkara Yang Masuk	Perkara Yang Putus di Tahun Berjalan	Realisasi
2020	I	46	52	70	71,42%
	II	46	102	126	85,13%
	III	46	150	166	84,69%
	IV	46	213	221	85,32%
2019	I	42	84	77	61,11%
	II	42	133	148	84,57%
	III	42	200	214	88,42%
	IV	42	277	273	85,57%

Tabel 8.2
Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara *Perdata* yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Tri Wulan	Sisa Tahun Lalu	Perkara Yang Masuk	Perkara Yang Putus di Tahun Berjalan	Realisasi
2020	I	27	25	36	69,23%
	II	27	57	70	83,33%
	III	27	89	96	82,75%
	IV	27	130	133	84,71%
2019	I	31	48	48	60,75%
	II	31	74	90	85,71%
	III	31	105	124	91,17%
	IV	31	152	156	85,24%

Tabel 8.3
Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Tri Wulan	Sisa Tahun Lalu	Perkara Yang Masuk	Perkara Yang Putus di Tahun Berjalan	Realisasi
2020	I	19	23	32	76,19%
	II	19	38	51	89,47%
	III	19	54	63	86,30%
	IV	19	74	81	87,09%
2019	I	11	36	29	61,70%
	II	11	58	58	84,05%
	III	11	94	89	84,76%
	IV	11	124	116	85,92%

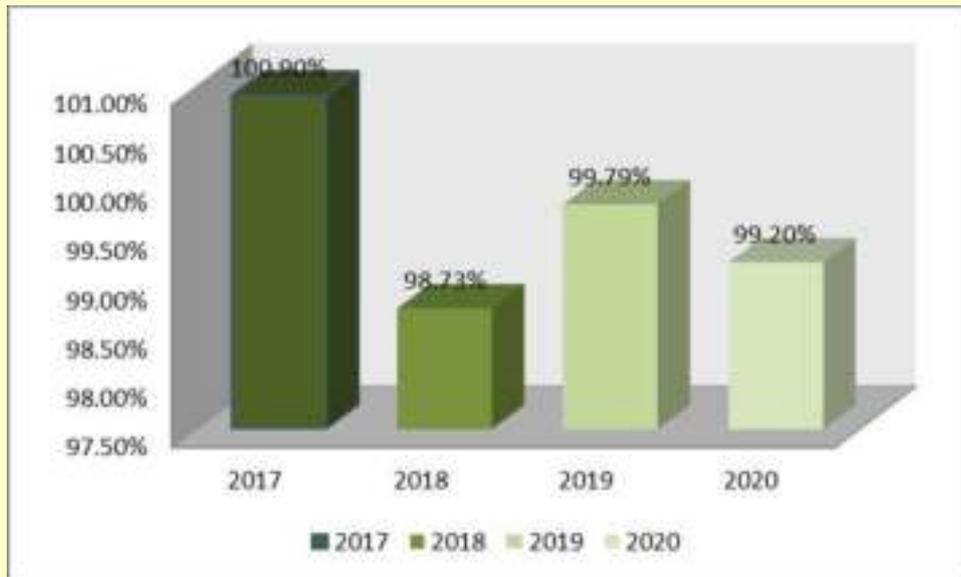
Tabel 8.4
Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Tri Wulan	Sisa Tahun Lalu	Perkara Yang Masuk	Perkara Yang Putus di Tahun Berjalan	Realisasi
2020	I	-	4	2	50%
	II	-	7	5	71,42%
	III	-	7	7	100%
	IV	-	9	7	77,77%
2019	I	-	-	-	-
	II	-	1	-	0%
	III	-	1	1	100%
	IV	-	1	1	100%

Tabel 9.
Perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	jumlah perkara yang ada	Target	Realisasi	Capaian
2020	221	259	86%	85,32%	99,20%
2019	273	319	85,76%	85,58%	99,79%
2018	265	307	87,75%	86,32%	98,73%
2017	255	288	87,75%	88,54%	100,9%

Grafik 2.
Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu



Keterangan :

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 86%, jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan sebanyak 221 perkara dari jumlah perkara yang ada sebanyak 259 perkara. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 85, 32% dan memperoleh capaian sebanyak 99,20 % . Hal ini menunjukkan bahwa Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 realisasi capaian sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2020-2024. Tercapainya target persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 karena penyelesaian perkara sesuai dengan SOP dan karena adanya pengawasan rutin yang dilakukan oleh panitera muda. di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 dikarenakan banyaknya perkara yang masuk diakhir tahun pada tahun 2020 sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan yaitu tahun 2021.

Tabel 9.2
*Perbandingan Persentase perkara **Perdata** yang diselesaikan tepat waktu*

Tahun	jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	jumlah perkara yang ada	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	133	157	86%%	84,71%	98,5%
2019	156	183	85,76%	85,24%	99,39%

Tabel 9.3
*Perbandingan Persentase perkara **Pidana** yang diselesaikan tepat waktu*

Tahun	jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	jumlah perkara yang ada	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	81	93	86%	87,09%	101,26%
2019	119	135	85,76%	88,14%	102,78%

Tabel 9.4
*Perbandingan Persentase perkara **Tipikor** yang diselesaikan tepat waktu*

Tahun	jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	jumlah perkara yang ada	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	7	9	86%	77,77%	90,43%
2019	1	1	85,76%	100%	116,60%

❖ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 untuk indikator ini adalah 36%, yang mengajukan upaya hukum sebanyak 150 perkara sedangkan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 71 perkara. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 32,13% dan capaiannya adalah 114,75% hal ini menunjukkan bahwa dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 capaian sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2020-2024. Tercapainya persentase target dikarenakan kinerja seluruh SDM yang terkait sesuai

dengan SOP serta kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Tabel 12.1 Evaluasi Tri Wulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tahun	Tri Wulan	Putus Banding	Yang Mengajukan Upaya Hukum	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Presentase (%)
2020	I	70	45	25	35.71%
	II	126	86	40	31.75%
	III	166	116	50	30.12%
	IV	221	150	71	32.13%
2019	I	77	35	42	54.55%
	II	148	76	72	48.65%
	III	212	119	93	43.87%
	IV	270	159	111	41.11%

Tabel 12.2 Evaluasi Tri Wulan Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tahun	Tri Wulan	Putus Banding	Yang Mengajukan Upaya Hukum	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Presentase (%)
2020	I	36	26	10	27.78%
	II	70	47	23	32.86%
	III	96	65	31	32.29%
	IV	133	85	48	36.09%
2019	I	48	21	27	56.25%
	II	90	42	48	53.33%
	III	124	65	59	47.58%
	IV	155	84	71	45.81%

Tabel 12.3 Evaluasi Tri Wulan Persentase perkara **Pidana** yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tahun	Tri Wulan	Putus Banding	Yang Mengajukan Upaya Hukum	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Presentase (%)
2020	I	32	19	13	40.63%
	II	51	34	17	33.33%
	III	63	44	19	30.16%
	IV	81	58	23	28.40%
2019	I	29	14	15	51.72%
	II	58	34	24	41.38%
	III	87	53	34	39.08%
	IV	114	74	40	35.09%

Tabel 12.4 Evaluasi Tri Wulan Persentase perkara **Tipikor** yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tahun	Tri Wulan	Putus Banding	Yang Mengajukan Upaya Hukum	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Presentase (%)
2020	I	2	0	2	100.00%
	II	5	5	0	0.00%
	III	7	7	0	0.00%
	IV	7	7	0	0.00%
2019	I	0	0	0	0.00%
	II	0	0	0	0.00%
	III	1	1	0	0.00%
	IV	1	1	0	0.00%

Tabel 13.1
Perbandingan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020 dan tahun 2019

Tahun	Yang mengajukan upaya hukum	Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	150	71	28%	32,13%	114,75%
2019	159	111	36%	41.11%	114.19%

Grafik 4.
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi



Tabel 13.2
Perbandingan Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020 dan tahun 2019

Tahun	Yang mengajukan upaya hukum	Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	85	48	28%	36.09%	128,89%
2019	84	71	36%	45.81%	127.25%

Tabel 13.3
Perbandingan Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020 dan tahun 2019

Tahun	Yang mengajukan upaya hukum	Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	58	23	28%	28.40%	101,42%
2019	74	40	36%	35.09%	97.47%

Tabel 13.4
Perbandingan Persentase perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020 dan tahun 2019

Tahun	Yang mengajukan upaya hukum	Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	7	0	28%	0.00%	0.00%
2019	1	0	36%	0.00%	0.00%

d. Index Responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 mencapai nilai 97,61 / 3,90 hal tersebut melebihi target yang telah ditentukan, pencapaian Tahun sebelumnya juga melebihi target hal tersebut karena Seluruh SDM Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP dengan memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip 5R (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi perkara baik pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yaitu persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Tabel.14 Index responden Masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Periode 1 Tahun 2020 NILAI : 97,61/3,90 Dalam skala A (Sangat baik): 81,25 - 100 : 3,25 – 4,00
--

Tabel.15 Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2019 Semester II

<p>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014</p> <p>Periode 2 Tahun 2019</p> <p>NILAI : 84,00/3,36</p> <p>Dalam skala A (Sangat baik): 81,25 - 100 : 3,25 – 4,00</p>

Tabel.16 Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2019 Semester I

<p>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>Periode 2 Tahun 2019</p> <p>NILAI : 80,64 /3,23</p> <p>Dalam skala B (Baik): 62,51 - 81,25: 2,51 - 3,25</p>
--

Grafik 5.
Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Keterangan :

Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 mencapai nilai 97,65 hal tersebut melebihi target yang telah ditentukan, pencapaian Tahun sebelumnya juga melebihi target hal tersebut karena Seluruh SDM Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP dengan memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip 5R (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi perkara baik pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yaitu persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu , Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 17.
Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
	URAIAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2019
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	- Perdata				
	- Pidana	100%	100%	100%	100%
	- Tipikor	100%	100%	100%	100%

	b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus (Tipikor)	100%	100%	100%	120%
--	---	------	------	------	------

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :

a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Tabel 19.1

Evaluasi Tri Wulan

Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Tahun	Tri Wulan	Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Persentase
2020	I	70	70	100%
	II	126	126	100%
	III	166	166	100%
	IV	221	221	100%
2019	I	77	77	100%
	II	148	148	100%
	III	214	214	100%
	IV	273	273	100%

Tabel 19.2

Evaluasi Tri Wulan

*Persentase salinan putusan **Perdata** yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu*

Tahun	Tri Wulan	Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Persentase
2020	I	36	36	100%
	II	70	70	100%
	III	96	96	100%
	IV	133	133	100%
2019	I	48	48	100%
	II	90	90	100%
	III	124	124	100%
	IV	156	156	100%

Tabel 19.3
Evaluasi Tri Wulan

Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Tahun	Tri Wulan	Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Persentase
2020	I	32	32	100%
	II	51	51	100%
	III	63	63	100%
	IV	81	81	100%
2019	I	29	29	100%
	II	58	58	100%
	III	89	89	100%
	IV	116	116	100%

Tabel 19.4
Evaluasi Tri Wulan

Persentase salinan putusan Tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Tahun	Tri Wulan	Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Persentase
2020	I	2	2	100%
	II	5	5	100%
	III	7	7	100%
	IV	7	7	100%
2019	I	0	0	100%
	II	0	0	100%
	III	1	1	100%
	IV	1	1	100%

Tabel 20.1

Perbandingan Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2019, dan tahun 2020

Tahun	Salinan yang dikirim ke pengadilan pengaju	Jumlah Putusan	Target	Realiasi	Capaian
2020	221	221	100%	100%	100%
2019	273	273	100%	100%	100%

Grafik 6.
Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu



Keterangan :

Target dalam indikator ini sebanyak 100 %, salinan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu sejumlah 221 dari 221 jumlah putusan sehingga Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerjanya 100%. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2020-2024 realisasi sudah sesuai dengan target pada tahun 2020, dan capaian 100% juga diraih pada tahun 2019 hal ini disebabkan karena SDM yang terkait bekerja sesuai dengan SOP dan adanya pantauan secara rutin oleh Panitera Muda.

Tabel 20.2

*Perbandingan Persentase salinan putusan **Perdata** yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2019, dan tahun 2020*

Tahun	Salinan yang dikirim ke pengadilan pengaju	Jumlah Putusan	Target	Realiasi	Capaian
2020	133	133	100%	100%	100%
2019	156	156	100%	100%	100%

Tabel 20.3

*Perbandingan Persentase salinan putusan **Pidana** yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2019, dan tahun 2020*

Tahun	Salinan yang dikirim ke pengadilan pengaju	Jumlah Putusan	Target	Realiasi	Capaian
2020	81	81	100%	100%	100%
2019	116	116	100%	100%	100%

Tabel 20.4

*Perbandingan Persentase salinan putusan **Tipikor** yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2019, dan tahun 2020*

Tahun	Salinan yang dikirim ke pengadilan pengaju	Jumlah Putusan	Target	Realiasi	Capaian
2020	7	7	100%	100%	100%
2019	1	1	100%	100%	100%

- b. Persentase putusan perkara Tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tabel 21.
Evaluasi Tri Wulan Tahun 2019-2020
Persentase putusan perkara Tipikor yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tahun	Tri Wulan	Jumlah isi putusan perkara tipikor yang di upload dalam website	Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus	Persentase
2020	I	2	2	100%
	II	5	5	100%
	III	7	7	100%
	IV	7	7	100%
2019	I	0	0	100%
	II	0	0	100%
	III	1	1	100%
	IV	1	1	100%

Tabel 22.
Perbandingan Persentase putusan perkara Tipikor yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tahun	Jumlah isi putusan perkara yang di upload dalam website	Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus	Target	Realisasi	Capaian
2020	7	7	100%	100%	
2019	1	1		100%	

Grafik 7.
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus



Keterangan :

persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dapat direalisasikan pada tahun 2020 adalah 100% maka capaian kinerjanya 100% dari target yang ditetapkan. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2020-2024 realisasi sudah sesuai dan melebihi dengan target pada tahun 2020 dan pada tahun 2019 . Tercapainya target dikarenakan sarana dan prasarana yang mendukung serta terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait dalam penerbitan amar putusan secara online.

Gambar 3. Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 4.
Tampilan Aplikasi Informasi Perkara pada Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 5. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Perdata

The screenshot shows the 'Daftar Perkara Perdata PT' (Civil Case List) page. It features a search bar and a table with the following columns: No, No Perkara, Pengadilan Banding, No/Status Perkara, Status Perkara, and Detail. The table lists four cases, each with a unique case number and a status of 'Status Perkara: Belum Putus'.

No	No Perkara	Pengadilan Banding	No/Status Perkara	Status Perkara	Detail
1	No Perkara PT : S/PT/2020/PT/YK No Perkara PB : S/PT/2020/PT/YK	Ajal PB : PA Ganesa Tanggal Penyelesaian : 20 Februari 2020		Status Perkara: Belum Putus	Detail
2	No Perkara PT : S/PT/2020/PT/YK No Perkara PB : S/PT/2020/PT/YK	Ajal PB : PA Ganesa Tanggal Penyelesaian : 20 Februari 2020		Status Perkara: Belum Putus	Detail
3	No Perkara PT : S/PT/2020/PT/YK No Perkara PB : S/PT/2020/PT/YK	Ajal PB : PA Ganesa Tanggal Penyelesaian : 20 Februari 2020		Status Perkara: Belum Putus	Detail
4	No Perkara PT : S/PT/2020/PT/YK No Perkara PB : S/PT/2020/PT/YK	Ajal PB : PA Ganesa Tanggal Penyelesaian : 20 Februari 2020		Status Perkara: Belum Putus	Detail

Gambar 6. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Pidana

No	No Perkara	Permiswaan, Banding	Hasil Band Perkara	Status	Detail
1	No Perkara PT : S/PT/2018/PT/VI No Perkara PM : 230/PALU/2018/PM/BI	Asal PM : PM Suman Tanggal Permiswaan : 14 Desember 2018	Pengiriman	Status Putus: Sudah Putus	Detail
2	No Perkara PT : S/PT/2018/PT/VI No Perkara PM : 245/PALU/2018/PM/BI	Asal PM : PM Sumbul Tanggal Permiswaan : 14 Desember 2018	Pengiriman	Status Putus: Sudah Putus	Detail
3	No Perkara PT : S/PT/2018/PT/VI No Perkara PM : 245/PALU/2018/PM/BI	Asal PM : PM Sumbul Tanggal Permiswaan : 27 November 2018	Tidak Putus Lagi	Status Putus: Sudah Putus Tanggal Putus: 29 Januari 2019 Awar Singkat : Meringkaskan Dok. Putusan : Download	Detail

Gambar 7. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Tipikor

No	No Perkara	Permiswaan, Banding	Hasil Band Perkara	Status	Detail
1	No Perkara PT : S/PT/2018-TPK/2018/PT/VI No Perkara PM : 20/PT.Sca-TPK/2018/PM/VI	Asal PM : Pengadilan Tipikor & PM Yogyakarta Tanggal Permiswaan : 06 Agustus 2018	Tindak Pidana Korupsi	Status Putus: Sudah Putus Tanggal Putus: 12 Oktober 2018 Awar Singkat : Meringkaskan Dok. Putusan : Download	Detail
2	No Perkara PT : S/PT/2018-TPK/2018/PT/VI No Perkara PM : 21/PT.Sca-TPK/2018/PM/VI	Asal PM : Pengadilan Tipikor & PM Yogyakarta Tanggal Permiswaan : 15 Juli 2018	Tindak Pidana Korupsi	Status Putus: Sudah Putus Tanggal Putus: 04 Oktober 2018 Awar Singkat : Meringkaskan Dok. Putusan : Download	Detail

Selain melalui melalui www.pt-yogyakarta.go.id pada menu informasi perkara, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam rangka keterbukaan informasi juga telah melaksanakan berbagai program yaitu :

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Gambar 8. Tampilan Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 9. Tampilan Peta SIPP Versi 3 Perkara Perdata

No. Putusan	Nama Pengadilan (Kode)	Nama Pengadilan	No. Perkara PT	No. Perkara PT	Jenis Perkara	Tgl. Pendaftaran Perkara	Tgl. Pengantar Perkara
1	PERGADAAHAN NEGRI-YOGYAKARTA	Kuasa Pengugat: BUNDAHARUN S.A	41/PDT/2020/PTN/PT	11/PDT/2020/PTN/PT	Siakal dan Gula ke Bujur Tengah	01 Dec 2019	03 Feb 2019
2	PERGADAAHAN NEGRI-WONGASARI	Pengadilan RA WONGASARI	22/PDT/2020/PTN/PT	4/PDT/2020/PTN/PT	Perkawinan	14 Nov 2019	16 Jan 2019
3	PERGADAAHAN NEGRI-CIBINAWA	Teknologi dan Informatika	44/PDT/2020/PTN/PT	11/PDT/2020/PTN/PT	Wongasari	13 Jan 2019	04 Sep 2019
4	PERGADAAHAN NEGRI-SICHANAPPA	Kuasa Pengugat: WYO DARMO	88/PDT/2020/PTN/PT	12/PDT/2020/PTN/PT	Perkawinan dan Hak-hak	08 Dec 2019	20 Nov 2019
5	PERGADAAHAN NEGRI-SIBIRI	Kuasa Pengugat: DHR PUSBA, SH	122/PDT/2020/PTN/PT	12/PDT/2020/PTN/PT	Perkawinan	06 Oct 2019	02 Nov 2019
6	PERGADAAHAN NEGRI-WONGASARI	Kuasa Pengugat: DDD ARUNG, SH	12/PDT/2020/PTN/PT	11/PDT/2020/PTN/PT	Perkawinan dan Hak-hak	01 Dec 2019	04 Dec 2019
7	PERGADAAHAN NEGRI-YOGYAKARTA	Kuasa Terang: WIRI DUNH	142/PDT/2020/PTN/PT	15/PDT/2020/PTN/PT	Perkawinan dan Hak-hak	21 Dec 2019	12 Nov 2019
8	PERGADAAHAN NEGRI-SIBIRI	Kuasa Terang: SAPTO PURONO WUDHANG, SH	222/PDT/2020/PTN/PT	2/PDT/2020/PTN/PT	Siakal dan Gula ke Bujur Tengah	27 Dec 2019	19 Jan 2019

Gambar 10. Tampilan Peta SIPP Versi 3 Perkara Pidana

No. Putusan	No. Perkara Pidana	No. Perkara Per	Jenis Perkara	Tgl. Penetapan Peradilan	Tgl. Keputusan Pengadilan
1	PERKARA PIDANA: Tindak Pidana TERORISME	22/PD/2011/PN/PT	Perdagangan	22 Nov 2011	12 Jan 2012
2	PERKARA PIDANA: Tindak Pidana TERORISME	22/PD/2011/PN/PT	Selanjutnya	12 Nov 2011	19 Jan 2012
3	PERKARA PIDANA: Tindak Pidana TERORISME	22/PD/2011/PN/PT	Selanjutnya	08 Des 2011	19 Feb 2012
4	PERKARA PIDANA: Tindak Pidana TERORISME	22/PD/2011/PN/PT	Kelompok Dalam Rumpun Terorisme	01 Apr 2011	12 Jun 2011
5	PERKARA PIDANA: Tindak Pidana TERORISME	22/PD/2011/PN/PT	Pelanggaran Mengenai Tanah, Negeri, dan Perairangan	30 Mei 2011	20 Sep 2011
6	PERKARA PIDANA: Tindak Pidana TERORISME	22/PD/2011/PN/PT	Selanjutnya	27 Jun 2011	18 Sep 2011
7	PERKARA PIDANA: Tindak Pidana TERORISME	22/PD/2011/PN/PT	Selanjutnya	08 Agu 2011	12 Des 2011

B. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah dilakukan pembinaan, koordinasi, monitoring secara berjenjang dan berkala, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2018, 2019 dan Tahun Anggaran 2020 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 23.

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018,2019 dan 2020

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020					
		PAGU DIPA	REALISASI	SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI	SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI	SISA DANA			
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	Rp		
1	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DIPA												
	B. Pegawai	31,943,095,000	31,942,746,009	100.00%	348,991	35,279,775,000	35,262,861,321	99.95%	16,913,679	32,853,739,000	32,833,297,870	99.94%	20,441,130
	B. Barang Opr	1,700,507,000	1,699,910,266	99.96%	596,734	2,027,595,000	2,013,650,538	99.31%	13,944,462	3,030,778,000	3,030,563,408	99.99%	214,592
	B. Barang Non Opr	130,608,000	130,399,636	99.84%	208,364	37,700,000	37,300,000	98.94%	400,000	229,958,000	229,904,601	99.98%	53,399
	B. Modal	552,690,000	552,650,412	99.99%	39,588	209,500,000	208,144,000	99.35%	1,356,000	104,335,000	103,840,000	99.53%	495,000
	Jumlah 01	34,326,900,000	34,325,706,323	99.99%	1,193,677	37,554,570,000	37,521,955,859	99.91%	32,614,141	36,218,810,000	36,197,605,879	99.94%	21,204,121
	B. Barang 03	130,618,000	129,251,400	98.95%	1,366,600	108,585,000	102,787,300	94.66%	5,797,700	190,525,000	190,065,900	99.76%	459,100
	Jumlah 03	130,618,000	129,251,400	98.95%	1,366,600	108,585,000	102,787,300	94.66%	5,797,700	190,525,000	190,065,900	99.76%	459,100

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terdapat penurunan penyerapan anggaran sebesar 0.01% untuk belanja pegawai karena banyaknya mutasi masuk hakim dan pegawai pada tahun 2020.

2. Belanja Barang Operasional

Belanja barang operasional mengalami kenaikan penyerapan anggaran sebesar 0,68% karena adanya kegiatan antisipasi penularan covid-19 dengan melakukan pemeriksaan swab terhadap seluruh pegawai pada tahun 2020.

3. Belanja Barang Non Operasional

Untuk belanja barang non operasional mengalami kenaikan penyerapan anggaran sebesar 1,04% karena adanya pelaksanaan kegiatan BIMTEK Kepaniteraan maupun Kesekretariatan di tahun 2020 dan penarikan dana BIMTEK dari pusat untuk penanggulangan covid.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal

Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 0,18% untuk belanja modal

karena pada tahun lalu 2018 Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak mendapatkan anggaran belanja modal.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Belanja Barang

Terjadi Penurunan penyerapan anggaran sebesar 5,1% untuk belanja barang pada program peningkatan manajemen peradilan (di badan peradilan umum) karena terbatasnya beberapa pelaksanaan kegiatan disebabkan pandemi covid serta menurunnya volume perkara dan para pencari keadilan pada tahun 2020.

C. PELAKSANAAN SAKIP

Seiring dengan tujuan manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratus dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun komponen-komponen SAKIP antara lain :

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Rencana Strategis (Renstra)
- c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- d. Perjanjian Kinerja (PKT)
- e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- f. Rencana Aksi (Rensi)
- g. Program Kerja

Pada Periode 2020, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se D.I.Yogyakarta telah melakukan penilaian sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	LKjIP 2016		LKjIP 2017		LKjIP 2018		LKjIP 2019	
		score	Nilai	score	Nilai	score	Nilai	score	Nilai
1.	PT. Yogyakarta	76,23	BB	76,70	BB	77,08	BB	78,26	BB
2.	PN Yogyakarta	72,92	B	74,23	B	77,63	BB	70,64	BB
3.	PN Sleman	71,30	B	69,57	B	74,11	B	71,59	BB
4.	PN Bantul	71,41	B	72,81	B	77,35	BB	73,24	BB
5.	PN Wates	72,18	B	73,22	B	75,1	BB	75,79	BB
6.	PN Wonosari	71,71	B	72,24	B	76,02	BB	77,03	BB

Berdasarkan data diatas, nilai LKjIP Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se D.I.Yogyakarta meskipun terdapat sakter tingkat pertama yang mengalami penurunan nilai akan tetapi sebagian besar satker tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta mengalami peningkatan. Hal ini dapat terjadi karena hasil pembinaan dari tingkat Banding Ke Tingkat pertama berjalan lancar.



BAB IV PENUTUP



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 ini memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama kurun waktu Tahun 2020 yang dituangkan dalam 2 (dua) program beserta sasaran dan targetnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta, karena laporan ini melaporkan suatu Pencapaian Kinerja selama Tahun 2020 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis. Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun yang akan datang.

B. SARAN

1. Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 diharapkan agar terwujud suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama yang dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif dan akuntabel.
3. Optimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja dan kelayakan LKjIP dengan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi LKjIP lebih optimal).



BAB V LAMPIRAN



BAB V - LAMPIRAN

1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2020
3. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020
5. Rencana Kinerja Tahun 2020
6. SK Penyusunan LKjIP Tahun 2020
7. SK Tim Penyusun RENSTRA tahun 2020-2024
8. SK Tim Evaluasi dan Monev LKjIP Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020
9. Penghargaan yang telah diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020

TABEL 24. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA 2020

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana khusus Tipikor	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk.Banding pada empat (empat) lingkungan peradilan. • sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan • Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera
		c. Persentase perkara		Panitera	Laporan

		<p>yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi 	<p><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u> x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 		<p>Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	<p>panitera</p>	<p>Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan</p>
2	<p>Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</p>	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p>	<p><u>Jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju</u> X 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <p>SEMA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online</p>	<p>Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: right;">X100%</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>secara online</p>	<p>Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat</p>		

		dalam waktu 1 hari setelah diputus	Catatan : <ul style="list-style-type: none">• One Day Publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dalam satu hari setelah diputus• Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish		
--	--	------------------------------------	---	--	--

TABEL 25.
REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN
TINGGI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor 	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor 	86% 86% 86%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Kasasi 	36%
		d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	85%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	100% 100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%

**TABEL 26. REVIU PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		- Pidana Khusus Tipikor	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		- Perdata	86%
		- Pidana	86%
		- Pidana Khusus Tipikor	86%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		- Kasasi	36%
		d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	85%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%

**TABEL 27. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	86% 86% 86%	84,71% 87,09% 77,77%	98,5% 101,26% 90,43%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Kasasi	36%	32,12%	89,22%
		d. Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	85%	97,65%	114,88%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------

Tabel.28 MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 – 2024.

- Tujuan : 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TAR GET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					STRATEGI			Anggaran
						2020	2021	2022	2023	2024	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel			1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Pidana Khusus - Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian sisa perkara perdata, pidana dan tipikor	71.805.000
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus - Tipikor	86%	86%	86%	86%	86%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor tepat waktu	
					c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Kasasi	36%	36%	36%	36%	36%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan kualitas putusan perkara banding	

					d.	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	85%	86%	86%	87%	87%			Mengumpulkan respon dari para pencari keadilan/ masyarakat melalui proses survey (Survey/ Index Kepuasan Masyarakat)	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			2.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu	118.720.000
					b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Pengembangan sistem Informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik	Program peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan Peradilan	Publikasi putusan perkara dalam waktu 1 hari setelah diputus	



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR :W13.U / 24 / SK / KPT / 1 / 2021

Tentang

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tertanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terselenggaranya Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
- Kesatu : Menunjuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Ketiga : Bahwa hal-hal yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2021





PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : W.13.U / 25 / SK / KPT/ I /2021

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : SK Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Hasil Rapat Tim Revisi indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembahasan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Revisi Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyesuaikan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 6 Januari 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



(SUBIPTO S.H., M.H.)

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Khusus TIPIKOR 	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan • Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Khusus TIPIKOR 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan • Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasasi 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Index responden Peradilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Peradilan tingkat banding</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permenn PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,5 dengan nilai konversi interval IKM Index harus \geq 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • One day publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dalam 1 hari setelah diputus • Maksudnya SEMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR :W13.U/166 / SK / KPT / I / 2021

Tentang

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tertanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2010-2035;
b. Bahwa dengan telah disusunnya Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
- Kesatu : Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum
dalam surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang
digunakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk
menetapkan rencana kinerja, menyampaikan rencana kinerja
dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas, serta melakukan evaluasi,
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Kedua : Rencana Strategis Tahun 2020-2024 disampaikan kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Januari 2021

KETUA
K. SURIPTO, S.H., M.H.





PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR :W13.U/27 / SK / KPT / 1 / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020
PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tertanggal 27 Nopember 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk dapat terselenggaranya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2020.
- Kesatu : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020.
- Ketiga : Bahwa hal-hal yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta
Pada tanggal 6 Januari 2021



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor : W13.U/PT/ISK/KPT/II/2021
Tanggal : 6 Januari 2021

TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020

No	JABATAN	TUGAS/ WEWENANG
1	Ketua	Penanggungjawab
2	Wakil	Ketua Tim
3	Panitera	Koordinator
4	Sekretaris	Sekretaris
5	Panitera Muda Perdata	Anggota
6	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	Panitera Muda Tipikor	Anggota
9	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota
10	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
11	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Anggota
12	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Anggota
13	Kasubbag Kepegawaian dan TI	Anggota
14	Kasubbag TU dan RT	Anggota
15	Analisis Perkara Pengadilan Kepaniteraan Hukum	Operator
16	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Operator



KETUA

SURIPTO, S.H., M.H



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : W13.U / 20 / SK / KPT / I / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI
PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2020,
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021,
SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tertanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terselenggaranya monitoring dan evaluasi (Monev) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, serta Rencana Kinerja Tahun 2022 pada pengadilan Tinggi Yogyakarta secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, serta Rencana Kinerja Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- b. Bahwa mereka yang Namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Dikym Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20 A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2020, DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021, SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA.**
- Kesatu** : **Menunjuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP) pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan Rencana Kinerja Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.**

- Kedua : Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan Rencana Kinerja Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas melaksanakan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Ketiga : Bahwa hal-hal yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Januari 2021

KETUA

SURIPTO, S.H., M.H

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor : W13.U/ 49 /SK/KPT/I/2021
Tanggal : 15 Januari 2021

TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI
PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2020,
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021,
SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2022
PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

No	NAMA	TUGAS/WEWENANG
1	Ketua	Pembina
2	Wakil Ketua	Pengarah
3	Panitera	Koordinator
4	Sekretaris	Sekretaris
5	Panitera Muda Hukum	Evaluator
6	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	Panitera Muda Perdata	Anggota
8	Panitera Muda TIPIKOR	Anggota
9	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota
10	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
11	Kasubbag Kepegawaian dan IT	Anggota
12	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Anggota
13	Kasubbag TU dan RT	Anggota
14	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Evaluator
15	Analisis Perkara Pengadilan Kepaniteraan Hukum	Operator
16	Pengelola Perkara Kepaniteraan Hukum	Anggota
17	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Evaluator



KETUA

SURIPTO, S.H., M.H



**PENGHARGAAN YANG
DITERIMA PENGADILAN
TINGGI YOGYAKARTA**

2020

MENDAPATKAN AKREDITASI “A” (EXCELLENT)



**PERINGKAT TERBAIK KE II SE DIY
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK**



**PENGHARGAAN TERHADAP
PELAKSANAAN E COURT SECARA PENUH
SESUAI DENGAN PERMA NO 3 TAHUN 2018**



NILAI LKjIP PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2017



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 13011
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

Jakarta, 7 Desember 2018

Nomor : 1770/BP/Eks/12/2018
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

5049

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Wojo Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. - Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100.
Setiap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban "Tidak" akan diberikan nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgment evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

Jawaban	Kriteria	Nilai
a	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100%)	1
b	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%)	0,75
c	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%)	0,50
d	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%)	0,25

e	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 20%)	0
---	--	---

4. Pengadilan Tinggi Yogyakarta memperoleh nilai sebesar **76,70 (BB)** atau **Sangat Baik**.
5. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Perencanaan Kinerja = Bobot 30% nilai yang diperoleh 24,59%:**
 - 1) Dokumen Renstra 2015-2019 telah disusun, dan telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah.
 - 2) Tujuan dan sasaran pada Renstra sudah berorientasi pada hasil, program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program, serta Renstra sudah menyajikan IKU.
 - 3) Indikator kinerja tujuan dan sasaran sudah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, namun target kinerja pada renstra belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
 - 4) Dokumen Renstra sudah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya, serta telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi).
 - 5) Pada implementasi renstra, dokumen renstra sudah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, serta sudah direviu secara berkala.
 - 6) Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan, sasaran sudah berorientasi pada hasil, serta target dalam dokumen RKT telah digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran.
 - 7) RKT telah menyajikan IKU, indikator kinerja sasaran dan kegiatan sudah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, namun target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
 - 8) Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja (PK), dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT unit kerja/satker dibawahnya, dan telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA).
 - 9) Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek, sasaran telah berorientasi pada hasil, indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, namun target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
 - 10) Dokumen PK belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala.
 - b. **Pengukuran Kinerja = Bobot 25% nilai yang diperoleh 19,11%:**
 - 1) Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
 - 2) Pada kualitas pengukuran, IKU sudah dapat diukur secara objektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur, cukup untuk mengukur kinerja, dan sudah dapat diukur realisasinya.
 - 3) Indikator kinerja sasaran sudah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur, cukup untuk mengukur sasaraannya, serta telah diukur realisasinya.

- 4) Pengumpulan data kinerja sudah dapat diandalkan namun belum sepenuhnya dilakukan secara berkala.
- 5) Pada implementasi pengukuran, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 6) Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja= Bobot 15% nilai yang diperoleh **12,00%**:

- 1) LKjIP sudah menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan, dan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi pada *output/outcome*, namun belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.
- 2) LKjIP sudah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan sehingga informasi kinerja dalam LkjiP dapat diandalkan, serta LkjiP telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.
- 3) Informasi yang disajikan dalam LKjIP telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta untuk peningkatan dan penilaian kinerja satker.

d. Evaluasi Internal = Bobot 10% nilai yang diperoleh **7,67%**:

- 1) Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja, dan terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
- 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja dibawahnya telah dilakukan, serta hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB, dan dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi namun belum sepenuhnya disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap.
- 4) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sudah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja, serta untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

e. Pencapaian Kinerja= Bobot 20% nilai yang diperoleh **13,33%**:

Target kinerja *output/outcome* telah dapat dicapai, capaian kinerja *output/outcome* lebih baik dari tahun sebelumnya, namun informasi mengenai kinerja *output/outcome* belum sepenuhnya dapat diandalkan.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Target kinerja pada Renstra, RKT dan PK agar ditetapkan dengan baik
- 2) Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Pengumpulan data kinerja agar dilakukan secara berkala.
- 2) Hasil pengukuran kinerja agar digunakan untuk pengendalian dan

pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja pada LKJIP agar disajikan dengan uraian yang lebih mendalam terutama mengenai faktor-faktor yang mendukung ataupun menghambat capaian kinerja serta cara untuk mengatasinya.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja agar disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap, sehingga hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi.

e. Pencapaian Kinerja

Dalam merumuskan sasaran dan indikator agar memperhatikan target yang telah ditetapkan, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pengadilan sehingga uraian pelaksanaan kegiatan dan proses yang telah dilakukan menggambarkan kinerja atau outcome yang memadai dan capaian serta peningkatan kinerja satker.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2017, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

NUGROHO SETIADJI

Tembusan Yth:

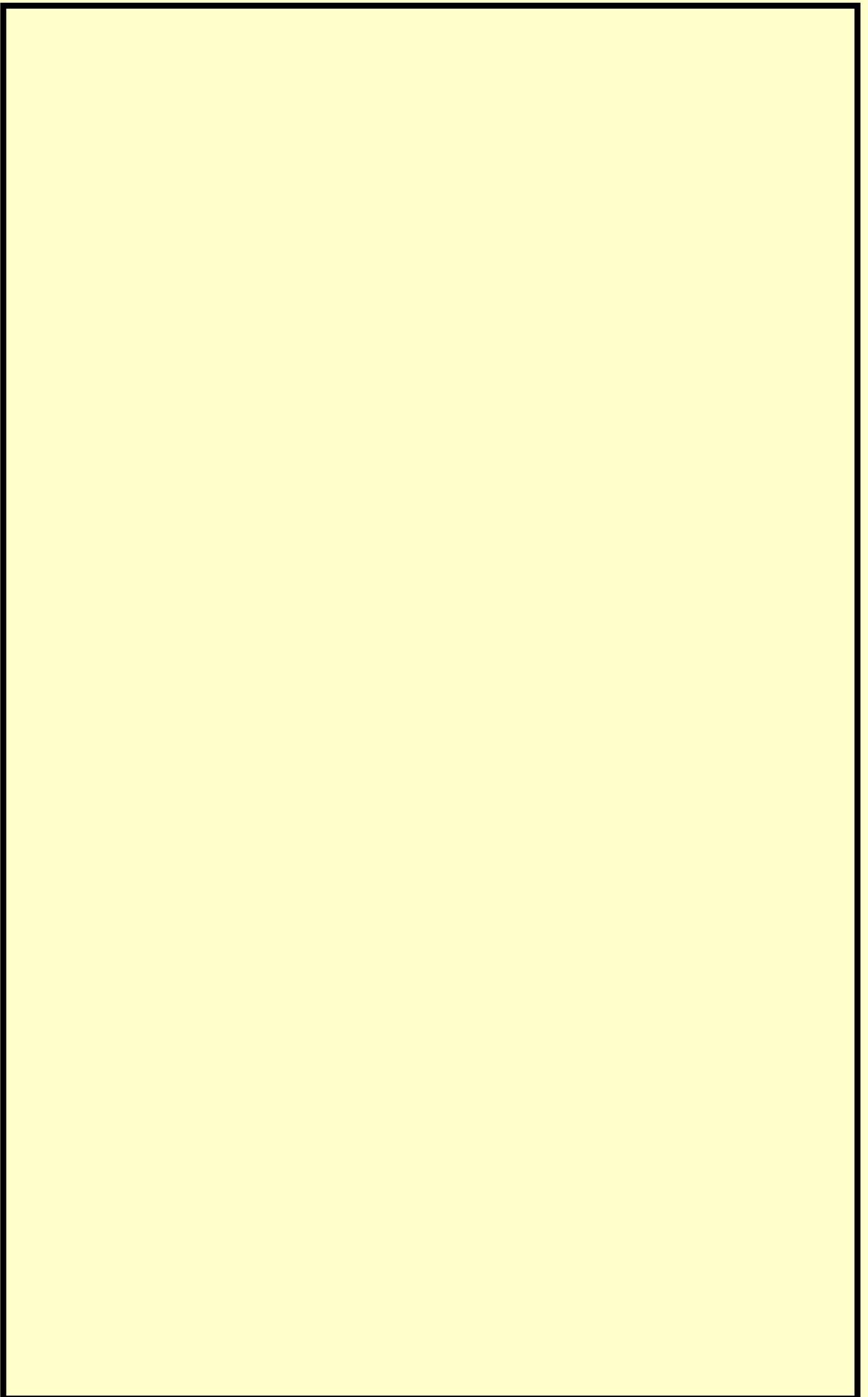
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kementerian PAN dan RB

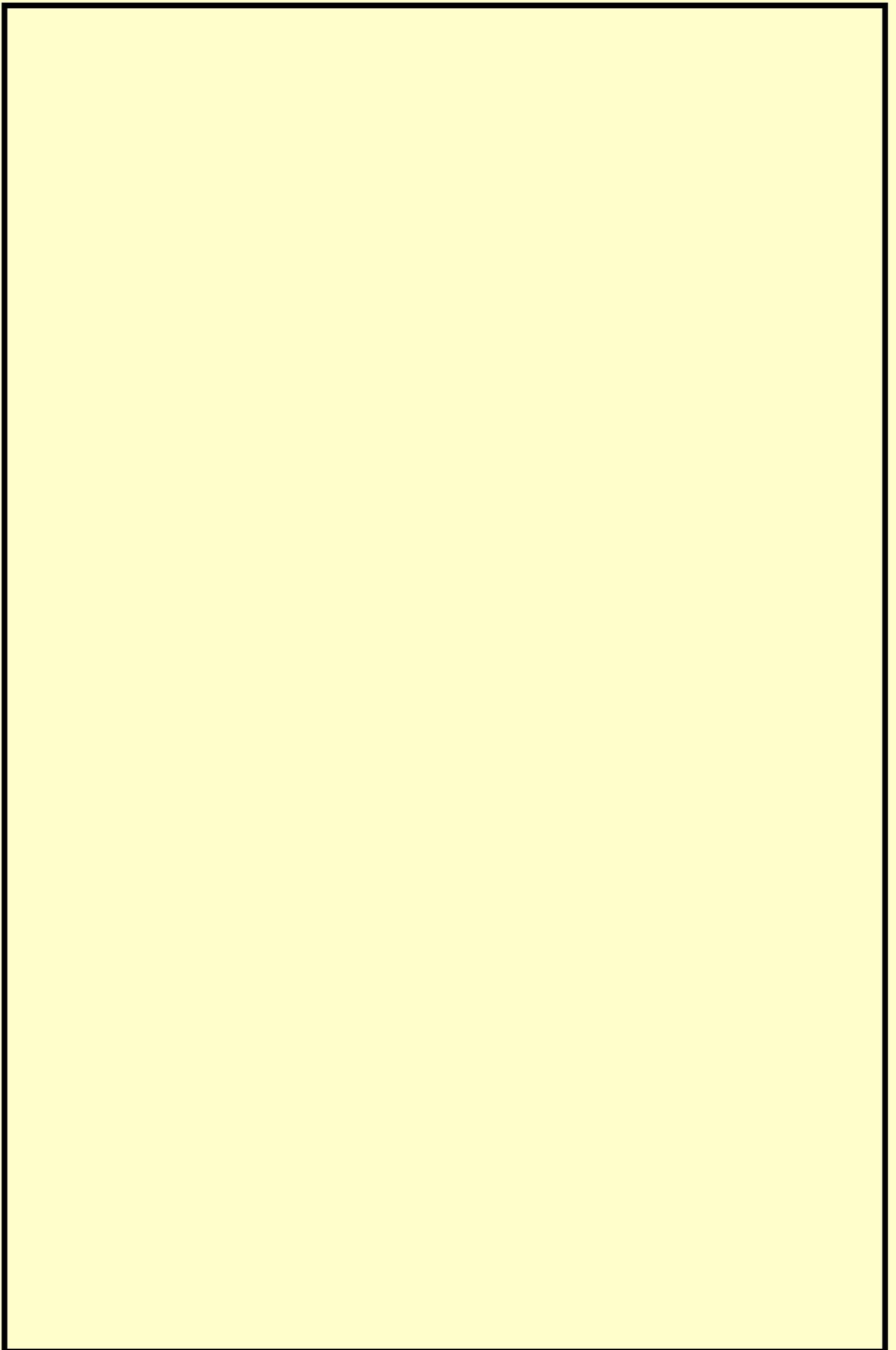
**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TAHUN : 2017**

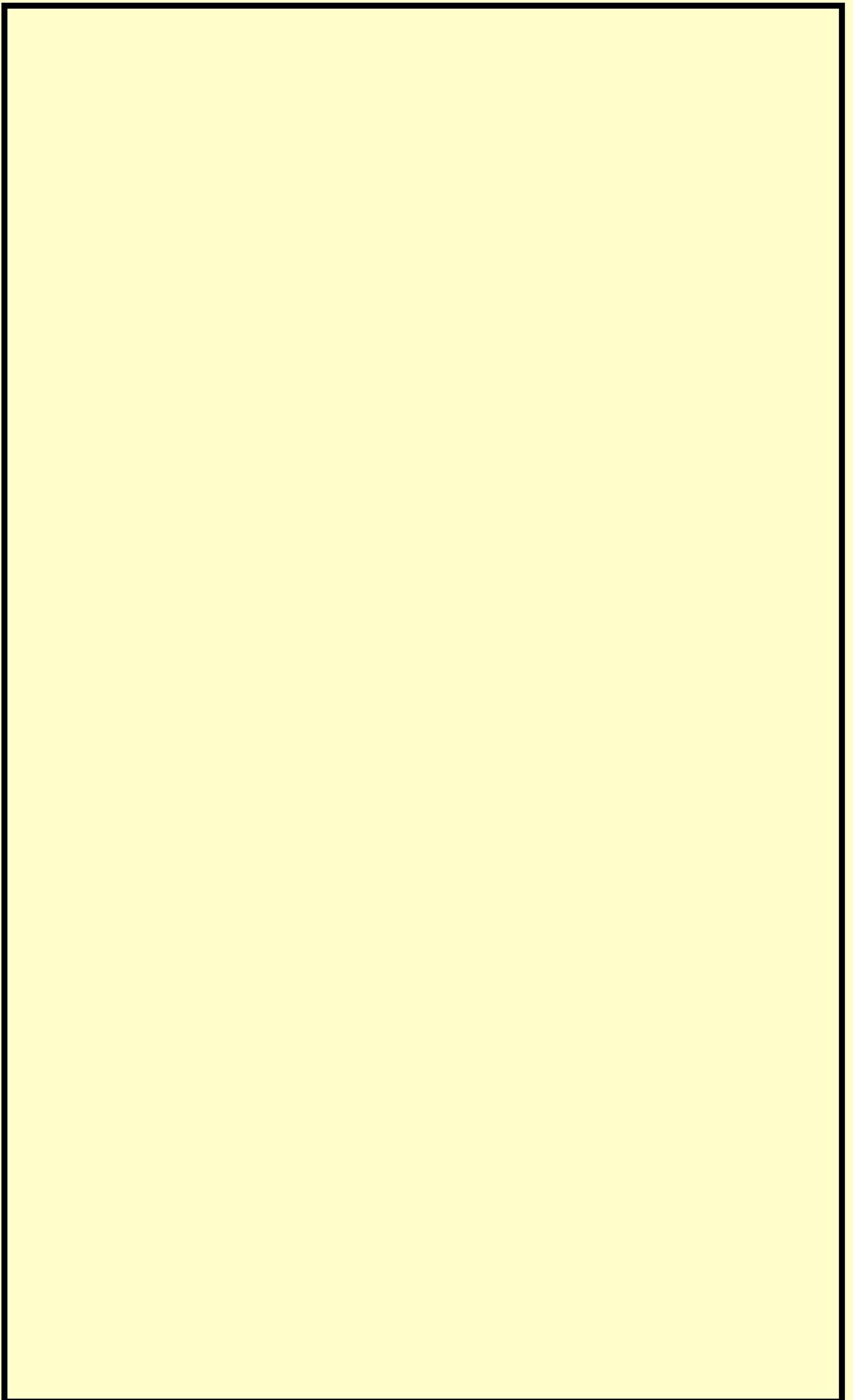
NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/BOBOT (%)	UNIT KERJA		TOTAL
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)				24,59
i. RENCANA STRATEGIS (10%)				8,38
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)				
1	Dokumen Renstra telah ada	y	1	1,00
2	Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah	a	1	1,00
				2,00
b. KUALITAS RENSTRA (5%)				
3	Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil	b	0,75	0,54
4	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program	b	0,75	0,54
5	Renstra telah menyajikan IKU	a	1	0,71
6	Indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0,75	0,54
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	c	0,5	0,36
8	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya	b	0,75	0,54
9	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	b	0,75	0,54
				3,75
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)				
10	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan	a	1	0,75
11	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Renstra unit kerja/satker dibawahnya	b	0,75	0,56
12	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	b	0,75	0,56
13	Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala	a	1	0,75
				2,63
ii. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7,5%)				6,34
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1,5%)				
1	Dokumen RKT telah ada	y	1	0,50
2	Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA	y	1	0,50
3	Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan	a	1	0,50
				1,50
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3,75%)				
4	Sasaran telah berorientasi hasil	b	0,75	0,47
5	Target dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapai sasaran	b	0,75	0,47
6	RKT telah menyajikan IKU	a	1	0,63
7	Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0,75	0,47
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik	c	0,5	0,31
9	Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra	a	1	0,63
				2,97
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2,25%)				
10	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja (PK)	a	1	0,75
11	Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT unit kerja/satker dibawahnya	b	0,75	0,56
12	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (a.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA)	b	0,75	0,56
				1,88

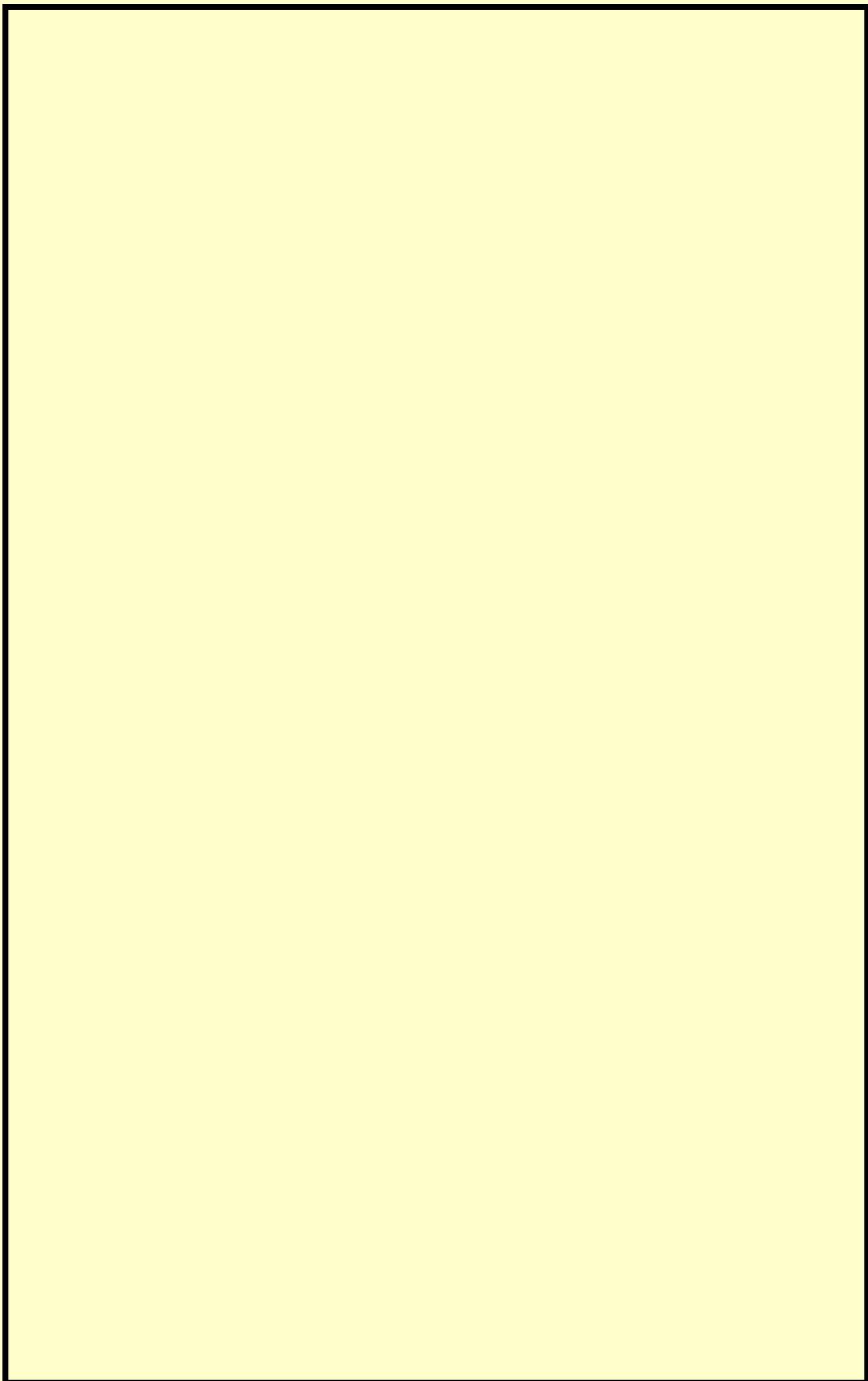
III. DOKUMEN PERJANIAN KINERJA (12,5%)				9,87
a. PEMENUHAN PK (2%)				
1	Dokumen PK unit kerja telah ada	y	1	0,67
2	Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui	y	1	0,67
3	Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek	a	1	0,67
				2,00
b. KUALITAS PK (6,5%)				
4	Sasaran telah berorientasi hasil	b	0,75	0,98
5	PK telah menyajikan IKU	a	1	1,30
6	Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0,75	0,98
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	c	0,5	0,65
8	Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT	a	1	1,30
				5,20
c. IMPLEMENTASI PK (4%)				
9	Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	c	0,5	0,67
10	Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	b	0,75	1,00
11	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	b	0,75	1,00
				2,67
				19,11
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)				
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)				
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	y	1	2,50
2	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	b	0,75	1,88
				4,38
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)				
3	IKU telah dapat diukur secara obyektif	b	0,75	0,78
4	IKU telah menggambarkan hasil	b	0,75	0,78
5	IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur	b	0,75	0,78
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	b	0,75	0,78
7	IKU telah diukur realisasinya	b	0,75	0,78
8	Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif	b	0,75	0,78
9	Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil	b	0,75	0,78
10	Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur	b	0,75	0,78
11	Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarnya	b	0,75	0,78
12	Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya	b	0,75	0,78
13	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	b	0,75	0,78
14	Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	c	0,5	0,52
				9,11
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)				
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	b	0,75	1,13
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	b	0,75	1,13
17	IKU telah direviu secara berkala	a	1	1,50
18	Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja	b	0,75	1,13
19	Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	c	0,5	0,75
				5,63
				12,00
C. PELAPORAN KINERJA (15%)				
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)				
1	LKJP telah disusun	y	1	1,50
2	LKJP telah disampaikan tepat waktu	y	1	1,50
				3,00
II. KUALITAS PELAPORAN (7,5%)				
3	LKJP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya	y	1	0,94
4	LKJP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output/outcome	b	0,75	0,70
5	LKJP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	b	0,75	0,70
6	LKJP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	b	0,75	0,70

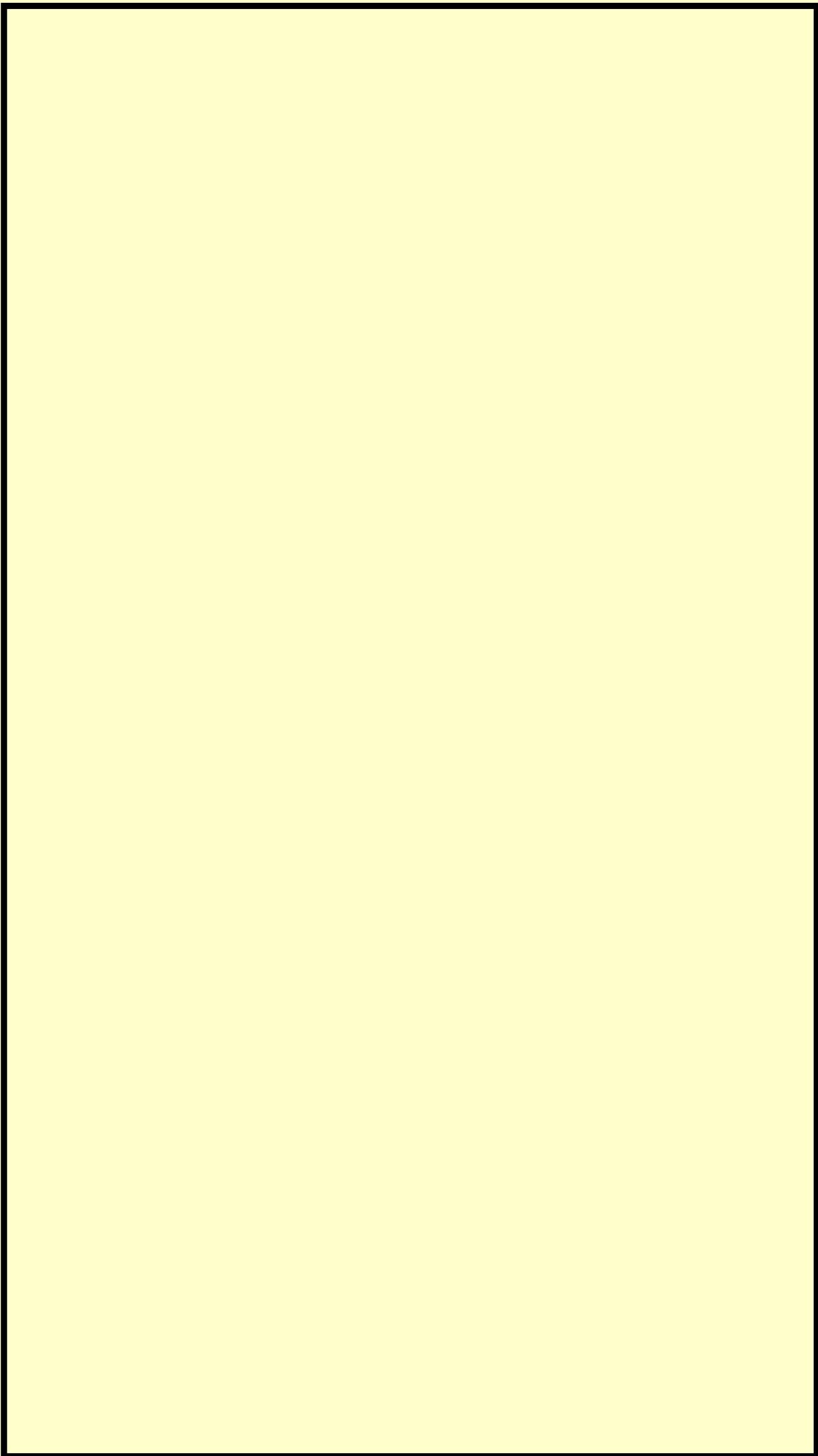
7	LKJIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	c	0,5	0,47
8	LKJIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	b	0,75	0,70
9	LKJIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	b	0,75	0,70
10	Informasi kinerja dalam LKJIP dapat diandalkan	b	0,75	0,70
				5,63
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)				
11	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	b	0,75	0,84
12	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	b	0,75	0,84
13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	b	0,75	0,84
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	b	0,75	0,84
				3,36
				7,67
D. EVALUASI INTERNAL (10%)				
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)				
1	Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja	y	1	0,50
2	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	a	0,75	0,38
3	Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja dibawahnya telah dilakukan	a	1	0,50
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	y	1	0,50
				1,88
II. KUALITAS EVALUASI (5%)				
5	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB	b	0,75	0,63
6	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompentensi	b	0,75	0,63
7	Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap	c	0,50	0,42
8	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi	b	0,75	0,63
9	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja memberikan penilaian atas akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja	b	0,75	0,63
10	Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan	b	0,75	0,63
				3,54
III. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI (3%)				
11	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	b	0,75	1,13
12	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja	b	0,75	1,13
				2,25
				13,33
E. CAPAIAN KINERJA (20%)				
I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)				
1	Target dapat dicapai	b	0,75	1,88
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	b	0,75	1,88
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	c	0,5	1,25
				5,00
II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)				
4	Target dapat dicapai	b	0,75	3,13
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	b	0,75	3,13
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	c	0,5	2,06
				8,33
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)				
				76,70











KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TAHUN : 2016

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/BOBOT (%)	UNIT KERJA		TOTAL
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)				24,48
I. RENCANA STRATEGIS (10%)				7,93
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)				
1	Dokumen Renstra telah ada	y	1	1,00
2	Dokumen Renstra telah memuat visi, misi tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah	b	0,75	0,75
b. KUALITAS RENSTRA (5%)				
3	Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil	b	0,75	0,54
4	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program	b	0,75	0,54
5	Renstra telah menyajikan IKU	a	1	0,71
6	Indikator kinerja tujuan (cutput/outcome) dan sasaran (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0,75	0,54
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	b	0,75	0,54
8	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra alasannya	b	0,75	0,54
9	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	b	0,75	0,54
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)				
10	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan	b	0,75	0,56
11	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Renstra unit kerja/satker dibawahnya	b	0,75	0,56
12	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	b	0,75	0,56
13	Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala	b	0,75	0,56
				2,25
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7,5%)				6,34
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1,5%)				
1	Dokumen RKT telah ada	y	1	0,50
2	Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA	y	1	0,50
3	Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan	a	1	0,50
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3,75%)				
4	Sasaran telah berorientasi hasil	b	0,75	0,47
5	Target dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapai sasaran	b	0,75	0,47
6	RKT telah menyajikan IKU	a	1	0,50
7	Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0,75	0,47
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik	b	0,75	0,47
9	Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra	b	0,75	0,47
				2,93
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2,25%)				
10	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja (PK)	a	1	0,75
11	Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT Unit kerja/satker dibawahnya	b	0,75	0,56
12	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (s.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA)	b	0,75	0,56
				1,86

